

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lassang Barat Takalar

Nur Afni¹, Syamsuddin AB²

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail:

afnin3416@gmail.com

syamsuddin.ab@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat serta Hambatan pendamping dalam Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Sosiologi, adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sumber data dalam penelitian ini yakni dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian dengan menggunakan kamera, buku catatan, alat perekam, dan pedoman wawancara. Setelah semua data terlm'kumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan reduksi data (data reduction). Penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (drawing conclusion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di Desa Lassang Barat yaitu: 1). Peran pendamping pada saat pertemuan awal dan validasi data, 2). Peran pendamping pada saat verifikasi pemenuhan syarat, 3). Peran pendamping pada saat pemuktahiran data, 4). Peran pendamping pada saat memfasilitasi proses pengaduan, 5). Peran pendamping pada saat pendampingan rutin. Adapun Hambatan pendamping dalam peran Program Keluarga Harapan di Desa Lassang Barat terbagi atas 3 hambatan yakni: hambatan pada saat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH. Kedua hambatan yang dihadapi pendamping yaitu perbedaan pendapat dengan pemerintah setempat. Ketiga hambatan yang dihadapi oleh pendamping yaitu kurangnya waktu rehat yang dimiliki oleh pendamping.

Kata Kunci: Peran, Pendamping PKH, Pemberdayaan, Masyarakat

Abstract: The Role of the Family Hope Program Facilitator on Community Empowerment and the Facilitator's Obstacles in the Role of the Hopeful Family Program for the Empowerment of the Poor. This research is a qualitative research with Sociological approach method, while the location of this research is in Lassang Barat Village, Polongbangkeng Utara District, Takalar Regency. The sources of data in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are by observation, interviews, and documentation. Research instruments using cameras, notebooks, recording devices, and interview guidelines. After all the data is collected, the researcher then analyzes the data with data reduction. Presentation of data (data display), and drawing conclusions (drawing conclusion). The results of this study indicate that the roles of PKH facilitators in Lassang Barat Village are: 1). The role of the facilitator during the initial meeting and data validation, 2). The role of the facilitator during verification of eligibility, 3). The role of the facilitator during data updating, 4) The role of the facilitator when facilitating the process complaints and, 5). The role of the companion during routine assistance. The obstacles for companions in the role of the Family Hope Program in West Lassang Village are divided into 3 obstacles, namely obstacles when providing understanding to the people who receive PKH assistance. The two obstacles faced by the facilitators were differences of opinion with the local government. The three obstacles faced by the facilitator are the lack of rest time for the companion.

Keywords: Role, PKH Facilitator, Empowerment, Community

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang, hal ini menjadikan Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan persoalan-persoalan rumit seperti kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk, pendidikan yang tidak berkualitas dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan menjadi salah satu tugas negara dan pemerintah untuk memenuhinya. (Isbandi Rukminto Adi, 2003). Kewajiban dalam memenuhi kebutuhan diatas terdapat pada pembukaan UUD Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kemiskinan, hakikat Kemiskinan di Indonesia sendiri membawa pengaruh yang signifikan untuk tingkat kesejahteraan. Kemiskinan merupakan fenomena global, yaitu kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti dapat diketahui bahwa seorang yang dikatakan miskin jika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan kata lain, orang tersebut hidupnya serba kekurangan serta tidak mempunyai harta lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, mereka yang termasuk kedalam garis ke-miskinan maupun kurang mampu adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pokok, jika didalam suatu Negara tingkat kemiskinannya cukup tinggi, maka biasanya Negara tersebut digolongkan kedalam Negara yang sedang berkembang. (Diyah Tri Rizki Setyawardani 2020). Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan

kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program sejenis dengan Program Keluarga Harapan pertama kali diimplementasikan di sejumlah Negara Amerika Latin dan Karibia. Tingkat kecerdasan, kekayaan, dan kemakmuran suatu bangsa tidak dipengaruhi oleh usia Negara itu atau ketersediaan sumber daya alam. Banyak pihak yang tidak memahami dan tidak bertindak konsisten dengan kenyataan bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh mutu gizi, kesehatan, dan pendidikan di usia dini dan di masa pertumbuhan anak. (Habibulloh, 2011). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk kedalam 14 kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTA) atau sederajat di dalam satu rumah tangga. Program ini telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial dan mengalami perluasan secara bertahap di beberapa daerah di Indonesia. Program ini memiliki hubungan kerjasama dengan sektor lain yaitu: Kementerian kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan BPS. (Erna Fidyatun, 2011)

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, di

harapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. (Apando Ekardo, 2003). Sejak tahun 2012 untuk memperbaiki sasaran penerima PKH data awal untuk penerima PKH di ambil dari Basis Data Terpadu dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (TNP2K). Sasaran PKH yang berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak adanya hasil pendataan program perlindungan sosial tersebut berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga yaitu (orang tua, ayah, ibu dan anak) orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu keluarga adalah unit yang sangat berdampak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dalam mencapai tujuan Program Keluarga Harapan maka pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat di perlukan. Pada level nasional di bentuk tim kordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat sampai pada tingkat Kabupaten terdapat tim kordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten. Pada tingkat Kecamatan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Pendamping PKH. Pendamping yang di maksud adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan pendamping dalam Program Keluarga Harapan adalah memberikan informasi penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus di lalui, melakukan validasi data peserta PKH, memberikan motivasi, pengawasan dalam pendampingan kepada peserta PKH agar memenuhi kewajiban-kewajibannya dan juga menjembatani peserta PKH dengan pihak-

pihak lain yang terlibat ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan adanya pendamping PKH maka peserta mendapatkan haknya khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, taraf pendidikan anak-anak, status kesehatan dan gizi ibu hamil.

Desa Lassang Barat berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 140 jiwa yang mendapatkan bantuan PKH, Dimana di setiap tahunnya penerima PKH di Desa Lassang Barat mengalami peningkatan seperti dilihat dari data 5 tahun kebawa yaitu dari tahun 2018 jumlah penerima PKH sebanyak 40 jiwa, pada tahun 2019 berjumlah 75 jiwa, di tahun 2020 berjumlah 97 jiwa, di tahun 2021 berjumlah 115 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penerima PKH di Desa Lassang Barat sebanyak 140 jiwa. (Rekapan Data Penerima PKH, 2022). .Masalah demi masalah dari penerima PKH maupun masyarakat sering kali muncul terkait dengan pendamping PKH di Desa Lassang Barat berjumlah 1 orang. Sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Lassang Barat ini belum memahami apa arti dari PKH itu sendiri dan kriteria seperti apa yang berhak menerima Program PKH tersebut, dengan ketidak tahuan masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di antara penerima PKH dan yang tidak menerima PKH, yang tidak menerima PKH itu merasa tidak adil dikarenakan mereka menganggap yang menerima PKH tersebut lebih mampu dari yang tidak menerima. Program Keluarga Harapan ini diberikan untuk masyarakat yang memiliki anak yang masih sekolah, SD, SMP, dan SMA, dan untuk mereka yang hamil, memiliki balita dan lansia dengan memberikan tunai kepada mereka untuk dipakai sesuai prosedur yang di perintahkan oleh pemerintah, itu semua berharap dapat meningkatkan taraf pendidikan anak dari penerima program PKH, serta peningkatan

kesehatan melalui imunisasi ibu hamil dan balita, namun selama ini penerima bantuan program PKH sering menggunakan bantuan dana pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan PKH. Itu semua dilihat pada anak-anak yang masih menggunakan seragam sekolah tidak layak pakai dan juga pada ibu dan balita yang tidak melakukan imunisasi pada tempat atau fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini mengenai peran pendamping program keluarga harapan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa lassangg barat kabupaten takalar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Peran

Teori secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya. (Made Aristia Prayudi, 2018).

Mengacu pada penjelasan diatas, dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis adalah sebagai berikut. a). Aktif; Aktif adalah seseorang yang selalu aktif seutuhnya dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi, b). Pasif; Pasif adalah suatu yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam masyarakat. c). Partisipatif; Partisipatif adalah yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. (Soerjono Soekanto, 2002). Terdapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat. (Dwi Narwoko, J, 2013). Adapun fungsinya yaitu: Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, memberi arah pada proses sosialisasi, menghidupkan system pengendalian control, nilai, norma dan pengetahuan. Peran juga berfungsi sebagai seseorang yang bisa menjaga kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai seorang ayah atau peran sebagai seorang ibu.

b. Pendamping

Pendamping adalah orang yang mendampingi (dalam perundingan dan sebagainya). Pendamping berasal dari kata dasar damping. Pendamping memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendamping dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial dan kegiatan pendamping merupakan pekerjaan sosial. Menurut Departemen Sosial 2009 menyatakan bahwa: "Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayaguna-kan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup

serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik.” Definisi pendamping Program Keluarga Harapan juga dikemukakan oleh Habibullah menyatakan bahwa “Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat”. Menurut Buku Saku Pendamping PKH “Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping ialah mendampingi langsung penerima manfaat PKH. Seorang pendamping dibutuhkan perannya karena kebanyakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak memiliki kekuatan apapun baik itu suara atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesungguhnya, untuk itulah mereka membutuhkan pendamping yang bisa mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka”.

Pendamping juga berfungsi sebagai Fasilitator yang membantu KPM untuk mencapai kualitas hidup dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup. Adapun syarat-syarat seorang pendamping pada Program Keluarga Harapan yaitu : a). Pendidikan minimal S1 dan yang lebih utama adalah lulusan pekerja sosial (PEKSOS), b). Mampu mengoperasikan computer, minimal program office (Word, Exel dan Power Point) dan penggunaan internet, c). Sanggup bekerja purna waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas, d). Diutamakan penduduk di kecamatan setempat.

c. Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau disebut PKH merupakan program pemberian bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini merupakan hasil evaluasi dari program BLT. Berbeda dengan

bantuan langsung tunai yang hanya memberikan uang tunai, PKH adalah program pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembelajaran tatap muka setiap bulan. Proses pembelajaran ini diberikan dengan harapan terjadi perubahan perilaku warga miskin dari berbagai hal seperti kesehatan, kebersihan juga cara berfikir (*mindset*). Proses pembelajaran dilakukan oleh pendamping sosial yang merupakan bagian dari sumber daya manusia kementerian sosial. Pendamping sosial PKH ini ditugaskan untuk melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan PKH juga beberapa kegiatan seperti proses pembelajaran yang disebut dengan P2K2 yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan setiap bulan. Program keluarga harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. (Kementrian Sosial, Pedoman PKH, 2019). Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut : a). Komponen Kesehatan; Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut : Ibu Hamil/nifas/menyusui. Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi atau berada dalam masa

menyusui. Anak Usia Dini. Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah. b). Komponen Pendidikan; Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat, dan SMA/MA sederajat.

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante atau bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2013). Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post_strukturalis*. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi. Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan structural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut: prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. (Sri Najati 2005). Manajemen strategi berupaya untuk mendayagunakan berbagai peluang baru yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang untuk memberdayakan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat ada tiga strategi yang harus ditempuh menurut Kartasmita yaitu: a) kemandirian dan keberdayaan tiap individu perlu diberdayakan. b). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menabung berbagai masukan, menyediakan berbagai prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah, terbukanya berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan dalam upaya memberdayakan rakyat ini yang penting adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, informasi, lapangan kerja dan pasar.c). Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. (Ginjar Kartasmita, 1996).

e. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan. Kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi tersebut meliputi kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, misalnya kebutuhan konsumsi individu (Sandang, Pangan, dan Papan) maupun keperluan pelayanan sosial (air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan). Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan kultural dan struktural.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy.J Moleong, 2007). Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam memperoleh data melalui pendekatan lapangan, wawancara dalam suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem. Tujuannya untuk memperoleh analisa data, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nurhidayat Muh. Said. 2013). Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini di pertimbangkan latar belakang, pelaku,

peristiwa dan proses sesuai dengan kerangka dan perumusan masalah. (Syamsuddin AB, 2017). Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: observasi, wawancara, dokumentasi

pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Teknik peneliti untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti memilih informan yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dalam penelitian. Selain itu peneliti juga harus mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih merupakan orang yang paling mengetahui informasi tentang penelitian yang sedang diteliti. Dalam data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi objek peneliti, namun juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun teknik analisis dalam penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut :Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*) ,Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

D. HASIL PENELITIAN

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pendamping adalah upaya terus

menerus dan sistematis dalam rangka mendampingi atau memfasilitasi individu atau kelompok dalam mengembangkan sumberdaya atau potensi untuk perubahan hidup yang lebih baik. Pelaksana pendamping ini mendapatkan predikat sebagai pendamping yang memiliki kompetensi professional dalam melakukan pelayanan sosial. Pendampingan dilaksanakan atas dasar pada pemberian

dorongan, masukan dan saran yang bersifat membangun dengan suasana keterbukaan, saling percaya dan saling menghargai, serta mendorong keinginan yang kuat untuk berbagi dan belajar satu sama lain. Pendamping menjadi sangat penting keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Pendamping memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga peran yang dimiliki menjadi salah satu cara untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun yang datang dari masyarakat. Program Keluarga Harapan yaitu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk ke dalam kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun dan tanggungan anak sekolah sampai dengan Sekolah Lanjut Pertama (SLTA) di dalam suatu rumah tangga. Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku RTSM/KPM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan terutama pada kelompok RTSM/KPM. Adapun Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Desa Lassang Barat yaitu:

1. Pertemuan awal dan validasi data calon peserta PKH

Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk melakukan sosialisasi program kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan ini dilakukan pendamping dengan Kepala Desa dan para calon penerima, pertemuan ini bisa dikatakan sosialisasi pra calon penerima bantuan PKH yang dimaksudkan bahwa peserta yang hadir

disini belum tentu semuanya terpilih dalam bantuan PKH tapi disini masih ada tahap seleksi berkas. Dalam pertemuan awal ini dihadiri oleh ibu atau wanita yang sudah dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan yaitu seperti nenek, tante atau saudara perempuan. Karena yang tercantum sebagai penerima atau peserta adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak bukan kepala rumah tangga atau (Ayah). Namun terdapat pengecualian jika di dalam pertemuan tersebut pihak perempuan berhalangan untuk menghadiri pertemuan pra calon penerima maka bisa digantikan dengan kepala rumah tangga atau siapapun yang bisa mewakili. Pertemuan awal ini para calon peserta PKH dalam mengikuti sosialisasi diharuskan untuk membawa data-data yang di perlukan untuk validasi atau mencocokkan data-datanya yaitu diminta untuk membawa kartu keluarga, foto copy KTP, KIS, KIP, dan lain sebagainya. Bahwa pada saat pertemuan awal dan validasi data calon peserta PKH bahwa sebelum pendamping turun kelapangan mereka sudah membawa nama-nama calon penerima bantuan yang lolos untuk seleksi berkas dan sesuai dengan komponen PKH. Bahwa peran pendamping pada saat pertemuan awal dan validasi sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya visi dan misi program tersebut dan pendamping sudah menjalankan peranya dengan sangat baik.

2. Verifikasi pemenuhan syarat

Proses verifikasi itu dilakukan oleh pendamping dengan sistem wawancara langsung mengenai keadaan dan kondisi para peserta mengenai kelayakan didalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan PKH. Syarat-syarat

komponen yang harus dipenuhi diantaranya yaitu peserta yang memiliki anak yang masih duduk di bangku pendidikan seperti SD, SMP, SMA, anak yang masih balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Verifikasi di Desa Lassang Barat dilakukan sebelum pencairan dana, proses pelaksanaan verifikasi data yang dilakukan pendamping ini untuk mengecek data perubahan data dari PKH apakah mereka layak atau tidak menerima dana bantuan dari PKH. Verifikasi atas pemenuhan syarat peserta PKH dalam komponen pendidikan dan komponen kesehatan, di Desa Lassang Barat verifikasi dilakukan secara rutin oleh pemberi layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk komponen kesehatan sendiri verifikasi dilakukan sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH dengan melakukan kunjungan kepuskesmas/pustu terdekat. Kegiatan ini biasanya rutin dilakukan sesuai jadwal posyandu masing-masing dusun, ibu hamil harus memeriksakan kandunganya setiap bulan pada saat posyandu dilakukan, bagi ibu nifas setiap bulan sesudah melahirkan, bayi yang berusia 0-6 tahun harus selalu mengikuti posyandu dan pemberian vitamin. Dalam melakukan kegiatan verifikasi, petugas kesehatan mencatat peserta PKH yang melakukan layanan kesehatan. Untuk komponen pendidikan yang bertanggung jawab dalam verifikasi itu adalah guru. Guru mencatat peserta didiknya yang tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85% hadir kesekolah atau ketentuan tatap muka bulannya kecuali saat sakit. Bahwa verifikasi data dan pemenuhan syarat peserta PKH itu harus selalu memenuhi setiap komitmen yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH). Bahwa pendamping sudah menjalankan peranya dengan baik karena terlebih dahulu dia menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap

anggota KPM dari komponen yang sudah ada di PKH.

3. Pemuktahiran data

Proses pemuktahiran data yaitu apabila ada perubahan data dari RTSM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada master data base yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendamping yang dilaksanakan oleh pihak PKH. Pemuktahiran data biasanya dari laporan peserta PKH dan pendamping bekerja sama dengan ketua kelompok peserta PKH untuk memverifikasi perubahan data terkait menggunakan format pemuktahiran data. Diantaranya yaitu : Perubahan tempat tinggal, Kelahiran anggota keluarga baru, Ibu hamil, Data baru sekolah (ada yang baru masuk sekolah dan ada yang baru tamat sekolah atau pindah), Pengurangan anggota keluarga, Perbaikan nama atau dokumen, Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses bahwa pemuktahiran data dilakukan apabila ada laporan masuk ke pendamping sehingga secepatnya dilakukan pemuktahiran data agar bantuan yang diberikan sesuai dengan komponen yang ada. Peran pendamping pada saat pemuktahiran data itu sangat diperlukan dan pendamping sudah menjalankan perannya sebagai pendamping dengan sangat baik. Pendamping PKH menerima dan melakukan tugasnya untuk menyelesaikan masalah ketika ada pengaduan yang disampaikan oleh peserta PKH.

4. Pendampingan Rutin

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PKH adalah melakukan kunjungan ke unit pelaksanaan pendidikan dan kesehatan, mengunjungi keluarga yang ingin dibantu untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah, membantu pengurusan akta kelahiran serta mendampingi peserta dalam proses pengisian data untuk keperluan PKH. Pendamping berkewajiban untuk menemani dan membantu peserta pendampingannya dalam hal yang menyangkut dengan program-

program PKH baik bagi keluarga yang tidak memiliki riwayat pendidikan maupun yang masih kurang berpendidikan. Bahwa pendampingan rutin oleh pendamping PKH sangat berguna untuk menyampaikan informasi terkait PKH dan bermanfaat untuk membuka ruang waktu bagi keluarga penerima manfaat PKH.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan, melalui observasi, dokumentasi serta wawancara maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut; Peran Pendamping PKH di Desa Lassang Barat yaitu: Peran pendamping pada saat melakukan pertemuan awal dan validasi data, Peran pendamping pada saat melakukan verifikasi pemenuhan syarat, Peran pendamping pada saat melakukan pemuktahiran data, Peran pendamping pada saat memfasilitasi proses pengaduan dan Peran pendamping pada saat melakukan pendampingan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, Ponorogo : Wade Group, 2017.

Ekardo, Apando, dkk. "Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 3, No 1.

Fidyatun, Erna. "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes", *Jurnal kesehatan masyarakat*.

Habibulloh, "Pendampingan Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang", *Jurnal informasi*, Vol. 16, No 02 :2011.

Handaya, Mudji. *Bagi Pendampingan dan Tutor Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)*,

- (Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2012).
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Masyarakat: Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas, 1996.
- Kementrian Sosial, Pedoman PKH, Jakarta : 2019.
- Machendrawati, Nanih, dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Munandar, Haris, dkk. "Peranan Tenaga Pendampingan Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara", *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 7 No.4 2019.
- Najiati, Sri, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Dilahan Gambut*, Bogor: Wetlands International-IP, 2005.
- Ningsih, Lili Rahayu. "Analisa dampak penerima program keluarga harapan (PKH) terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Simalungun", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Prayudi, Aristia, Made, dkk. "Teori Dan Konsep Expection-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 2 No.4 tahun 2018 Bali; Universitas Ganesa.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Rahmawati, dkk. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan", *Jurnal of Nonformal Education and Community Empowertment*.
- Risqiana, Eky. *Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan* (Studi Kasus Di Kecamatan Wonopringgo).
- Rosalina, Yulia, Shella. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang", *Skripsi Semarang* : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Gowa, Pusaka Almaid: 2019.
- Said, Muh, Nurhidayat. *Metode Penelitian dakwah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Soedjatmoko, *sejarah ekonomi sosial Indonesia Semarang*:1983.
- Soehartono, "Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial" Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta* Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung*:2011.
- Suprayoga, Imam. *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer* Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Yasid, Yasril dan Muhamad Soim, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zubaedi., *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta : Kencana, 2013.